



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**KECAMATAN CIJULANG**

*JL. RAYA CIJULANG NO. 248 FAX / TELP (0265) 2640296 CIJULANG 46394*

**KEPUTUSAN CAMAT CIJULANG**  
**NOMOR : 061/Kpts. 01.3 /Kec/2024**  
**LAMPIRAN : 1 (satu)**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA KANTOR KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN**  
**TAHUN 2024**

**CAMAT CIJULANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa setiap penyelenggara Perubahan pelayanan publik wajib menyusun menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;
  - b. Bahwa Perubahan Standar Pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
  - c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu disusun Perubahan Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  7. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;